



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCH. ABDUL KOBIR
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI PAPUA BARAT
3. NHK : 480520

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 685.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 556 m2/223 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/110 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/140 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 258.017.400

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.405.400
2. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.290.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 110.322.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. 847.244.800

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 691.565.211

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.481.827.411
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.481.827.411

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.